DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Agoes, S. (2021). *Reformasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arifianto, B. (2020). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Diponegoro University.

Djalil, R. (2018). *Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Elkha, F., & Wahidahwati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan, 15*(1), 45–60.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Imam Saputra. (2021). *Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan*. Surabaya: Graha Ilmu.

Julita, M., & Abdullah, T. (2020). Transparansi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 8*(2), 55–68.

Mahmudi. (2020). *Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Mahmudi. (2020). *Akuntabilitas Keuangan dalam Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2020). Teori Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Akuntansi Publik, 15*(3), 211–223.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mas'ut, I., Dewi, I. P., & Barus, M. J. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Badan

Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan Daerah, 12*(1), 25–37.

Nofianti, L. (2015). *Good Governance dan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nur Dwi Wulandari. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Malang: UMM.

Priyatno, D. (2019). *SPSS untuk Analisis Data Statistik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Purwati, R. (2021). Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik, 10*(1), 89–102.

Sako, U., & Lantowa, F. D. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science, 2*(1), 43–54.

Santoso, S. (2019). *Menguasai SPSS untuk Analisis Data Statistik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sihombing, E. R. S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Skripsi*, Universitas.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharti, & Tannia. (2020). *Pengelolaan Keuangan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung.

Syahputra, H. (2016). Teori Transparansi Publik. *Jurnal Good Governance, 5*(2), 87–95.

Wijaya, D. R., et al. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Kinerja Keuangan Bumdes. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4*(Spesial Issue 3), 1229–1242.

Wulandari, N. D. (2021). Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, dan Kegiatan Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Transparansi Publik, 9*(3), 187–201.

Yunita, S. (2019). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Alfabeta.

Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public, 4*(2), 77–88.

Badan Pemeriksa Keuangan (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023*.

Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2006 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Undang-Undang Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.